BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pers merupakan alat atau media yang muncul sebagai penyampai informasi melalui media cetak dan elektronik. Pers berasal dari kata dalam bahasa Inggris yang memiliki arti cetakan. Pers memiliki dua konteks makna yakni usaha percetakan dan upaya penyampaian melalui media berita dan elektronik.[1] Pers dapat digambarkan sebagai usaha dalam mewartakan suatu informasi melalui cara yang bermacam-macam seperti surat kabar, radio, televisi, dan internet. Bentuk pers yang beraneka macam ditujukan untuk menarik minat masyarakat dalam menerima berita atau informasi.[2]

Pers dapat disebut juga media dalam bentuk cetak atau elektronik yang secara konsisten menyampaikan laporan yang berupa fakta yang valid, pendapat, masukan, dan deskripsi atau gambaran kepada masyarakat. Langkah-langkah dalam proses pembuatan pers diperlukan bahan yang dikumpulkan hingga kemudian diwartakan. Pers dalam makana yang lebit terbatas dapat diartikan juga sebagai media tercetak dari surat kabar harian, surat kabar mingguan, majalah, dan bulletin.[3]

Pers dalam masyarakat kolonial tidak dapat dipahami hanya sebagai sarana penyampaian informasi yang netral. Pers justru menjadi arena produksi wacana

---

[1] Akhmad Efendi, *Perkembangan Pers di Indonesia,* (Semarang: Alprin.2010), 1.
[2] Muhammad Ainul Yaqin. *Analisis Muatan Konten Surat Kabar Sin Po 1920-1942,* (AVATARA, e Journal Pendidikan Sejarah), 2.
[3] Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 35.

yang merefleksikan sekaligus membentuk relasi kuasa antara pemerintah kolonial dan kelompok-kelompok dibawahnya. Ahmad Adam[4] menegaskan bahwa pers *vernacular* di Hindia Belanda berperan penting dalam membangun kesadaran politik modern melalui bahasa dan gagasan yang disebarluaskan kepada pembaca.

Perkembangan pers selalu terhubung dengan kondisi politik di suatu daerah atau wilayah, sama seperti yang terjadi di Hindia Belanda.[5] Politik di suatu daerah atau negara menyumbang catatan yang kompleks selama pers ada. Segala kejadian masa lampau atau tragedi di dalam suatu pemerintahan yang mencerminkan suatu masa dapat tersimpan dalam catatan ataupun rekaman pers. Pers dalam sejarah perkembangan Indonesia dikategorikan menjadi tiga bagian yakni pers tionghoa, pers kolonial, dan pers nasional.[6] Awal mula pers di Indonesia jauh sebelum Indonesia menjadi negara saat ini, lebih tepatnya saat Indonesia masih bernama Hindia Belanda pada pertengahan abad ke-18. Pers pertama kali diterbitkan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Pers yang dikelola oleh pemerintah Belanda disebut pers kolonial. Terbitan pertama pers kolonial berupa surat kabar yang bertajuk *Bataviase Nouvelles.* Kemudian disusul munculnya surat kabar lainya seperti *Bataviase Courant dan Bataviasche Advertentiblad* yang juga terbit di Baatavia. Pemerintah *VOC* menjadi penguasa atas pers atau media saat itu yang digunakan sebagai alat untuk menyampaikan kepentingan perusahaan. Pada abad ke-19 pemerintah kolonial

---

[4] Ahmad Adam. *Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesian*, (Jakarta : Penerbit Hasta Mitra, 2003), 301-304
[5] Samsul Wahidin. *Hukum Pers*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 89.
[6] Abdurrachmad Surjomihardjo. *Kota Yogyakarta Tempo Doeloe: Sejarah Sosial 1880-1930*. (Jakarta: Komunitas Bambu Jakarta, 2008), 175

memonopoli segala berita disurat kabar sebagai alat untuk tampil baik di publik. Semua surat kabar diharuskan melalui penyaringan dahulu sebelum akhirnya diterbitkan ke publik. Tujuanya untuk melihat media mana yang resmi dan non resmi.[7]

Media yang kedua adalah media Tionghoa. Media Tionghoa adalah media yang di jalankan orang Tionghoa yang ada di Indonesia. Biasanya media ini menggunakan bahasa China, juga bahasa Melayu serta bahasa Belanda. Media Tionghoa sendiri banyak difungsikan sebagai media promosi usaha dan juga mewartakan hal-hal yang berkaitan dengan kejadian yang terjadi di negeri China.[8] Target atau pelanggan media ini biasanya adalah orang Tionghoa peranakan dan juga kemungkinan penduduk Bumi Putera.[9] Media yang ketiga adalah media yang dijalankan oleh Bumi Putera yang dimana difungsikan sebagai penyebar pesan-pesan politik sampai ide kemerdekaan.[10]

Perkembangan pers di Hindia Belanda pada awal abad ke-20 tidak hanya ditandai oleh pertumbuhan pers bumiputra, tetapi juga oleh lahirnya pers Tionghoa yang menjadi bagian penting dalam dinamika kehidupan sosial dan politik masyarakat kolonial. Kemunculan pers Tionghoa tidak dapat dilepaskan dari perubahan posisi masyarakat Tionghoa di Hindia Belanda yang pada masa itu menghadapi berbagai bentuk diskriminasi sosial, politik, maupun pendidikan dari

---

[7] Abdurrachmad Surjomihardjo. *Kota Yogyakarta Tempo Doeloe: Sejarah Sosial 1880-1930*. (Jakarta: Komunitas Bambu Jakarta, 2008), 176.
[8] Muhammad Ainul Yaqin. Analisis Muatan Konten Surat Kabar Sin Po 1920-1942, *(AVATARA, e Journal Pendidikan Sejarah)*, 2.
[9] I Taufik. *Sejarah dan Perkembangan Pers Indonesia.* (Jakarta : Trinity Press, 1997), 14.
[10] Muhammad Ainul Yaqin. Analisis Muatan Konten Surat Kabar Sin Po *1920-1942*, *(AVATARA, e Journal Pendidikan Sejarah)*, 2.

pemerintah kolonial. Kebijakan pemerintah kolonial yang membedakan kedudukan hukum penduduk berdasarkan golongan menyebabkan masyarakat Tionghoa menempati posisi sebagai *Vreemde Oosterlingen* (Timur Asing), berada di bawah golongan Eropa tetapi di atas bumiputra. Meskipun memiliki peranan penting dalam bidang perdagangan dan perekonomian, masyarakat Tionghoa tetap mengalami berbagai pembatasan, termasuk terbatasnya kesempatan memperoleh pendidikan Barat. Kondisi tersebut mendorong munculnya kesadaran di kalangan elite Tionghoa untuk membangun organisasi modern yang mampu memperjuangkan kepentingan masyarakatnya sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan dan kehidupan sosial kaum Tionghoa di Hindia Belanda.[11]

Kesadaran tersebut diwujudkan melalui pendirian Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) di Batavia pada 17 Maret 1900 oleh Phoa Keng Hek bersama sejumlah tokoh Tionghoa lainnya. Organisasi ini pada mulanya bergerak dalam bidang pendidikan dan kebudayaan dengan tujuan membangkitkan kembali identitas budaya Tionghoa, memperkenalkan ajaran Konfusianisme, serta memperluas penggunaan bahasa dan aksara Tionghoa di kalangan generasi muda peranakan. Di samping itu, THHK juga menjadi sarana untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Tionghoa yang selama ini kurang memperoleh perhatian dari pemerintah kolonial. Keberhasilan THHK memperoleh pengakuan hukum dari pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1900 semakin memperkuat posisinya sebagai organisasi modern pertama masyarakat Tionghoa di Hindia Belanda. Bersamaan dengan

[11] Ahmad Kosasih, "Pers Tionghoa dan Dinamika Pergerakan Nasional," *Susurgalur: Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah* 1, no. 1 (2013): 43–45.

berkembangnya organisasi tersebut, muncul kebutuhan akan media komunikasi yang mampu menyebarluaskan gagasan, aktivitas organisasi, serta berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Tionghoa. Dalam konteks inilah surat kabar menjadi instrumen penting bagi lahirnya kesadaran kolektif di kalangan masyarakat Tionghoa peranakan.[12]

Surat kabar Tionghoa pertama yang banyak dianggap sebagai pelopor perkembangan pers Tionghoa peranakan ialah *Li Po* yang terbit di Sukabumi pada tahun 1901. Kehadiran *Li Po* menandai dimulainya fase baru perkembangan pers Tionghoa yang tidak lagi hanya berfungsi sebagai media penyampai informasi perdagangan, tetapi juga sebagai media pendidikan, penyebaran gagasan pembaruan, dan pembentukan identitas masyarakat Tionghoa. Keberadaan *Li Po* kemudian diikuti oleh lahirnya berbagai surat kabar lain di sejumlah kota besar di Hindia Belanda, seperti *Pewarta Soerabaia* di Surabaya dan *Warna Warta* di Semarang pada tahun 1902, *Chabar Perniagaan* di Batavia pada tahun 1903, *Djawa Tengah* di Semarang pada tahun 1909, serta *Sin Po* di Batavia pada tahun 1910. Kemunculan surat kabar tersebut menunjukkan bahwa dalam waktu kurang dari satu dekade pers Tionghoa berkembang cukup pesat dan membentuk jaringan informasi yang tersebar di berbagai pusat perdagangan dan pemerintahan kolonial. Pada fase ini, surat kabar Tionghoa masih didominasi oleh pembahasan mengenai

[12] Ahmad Kosasih, "Pers Tionghoa dan Dinamika Pergerakan Nasional di Indonesia 1900–1942," *Jurnal SUSURGALUH: Jurnal Kajian Sejarah dan Pendidikan Sejarah* (2013), 49–50.

pendidikan, kebudayaan, perdagangan, serta berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan komunitas Tionghoa di Hindia Belanda.[13]

Pada masa awal perkembangannya, sebagian besar perusahaan pers Tionghoa masih memanfaatkan tenaga redaktur berkebangsaan Belanda atau Indo-Eropa. Kondisi tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh keterbatasan kemampuan masyarakat Tionghoa dalam bidang jurnalistik, melainkan juga berkaitan dengan situasi politik kolonial yang menerapkan pengawasan ketat terhadap dunia pers. Redaktur berkebangsaan Belanda dianggap memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat sehingga relatif terlindungi dari ancaman delik pers maupun tindakan represif pemerintah kolonial. Namun, keadaan tersebut mulai berubah setelah pemerintah Hindia Belanda memberikan kedudukan hukum yang lebih tinggi kepada masyarakat Tionghoa pada awal abad ke-20. Sejak saat itu, semakin banyak tokoh Tionghoa yang mengambil alih posisi redaktur maupun pengelola surat kabar. Bahkan beberapa perusahaan pers Tionghoa mulai memberikan kesempatan kepada jurnalis bumiputra untuk bergabung sebagai penulis maupun redaktur. Perubahan ini menjadikan pers Tionghoa semakin mandiri sekaligus memperluas interaksi intelektual antara kalangan Tionghoa dan bumiputra dalam dunia jurnalistik.[14]

Memasuki dekade 1920-an, perkembangan pers Tionghoa mengalami fase yang jauh lebih dinamis dibandingkan periode sebelumnya. Jika generasi awal lebih banyak menitikberatkan pada persoalan pendidikan dan identitas etnis, maka surat

---

[13] Ahmad Kosasih, "Pers Tionghoa dan Dinamika Pergerakan Nasional di Indonesia 1900–1942," *Jurnal SUSURGALUH: Jurnal Kajian Sejarah dan Pendidikan Sejarah* (2013), 50–51; lihat juga Jayusman & Fachrurozi, "Eksistensi Kaum Tionghoa dalam Dunia Pers," 57.

[14] Ahmad Kosasih, "Pers Tionghoa dan Dinamika Pergerakan Nasional di Indonesia 1900–1942," *Jurnal SUSURGALUH: Jurnal Kajian Sejarah dan Pendidikan Sejarah* (2013), 43-51.

kabar yang lahir pada dekade ini mulai memberikan perhatian yang lebih besar terhadap persoalan politik, baik yang berkembang di Tiongkok maupun di Hindia Belanda. Munculnya surat kabar seperti *Bing Seng* (1922), *Keng Po* (1923), *Sin Jit Po* (1924), *Soeara Publiek* (1925), dan *Sin Bin* (1925) menunjukkan bahwa pers Tionghoa telah berkembang menjadi salah satu kekuatan penting dalam pembentukan opini publik masyarakat Tionghoa peranakan. Perkembangan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah kaum terpelajar Tionghoa, tetapi juga oleh semakin terbukanya ruang diskusi mengenai persoalan politik, nasionalisme, dan masa depan masyarakat Tionghoa di tengah perubahan situasi internasional setelah Revolusi Tiongkok 1911 serta berkembangnya gerakan nasional di Hindia Belanda. Dengan demikian, dekade 1920-an dapat dipandang sebagai periode penting dalam sejarah pers Tionghoa karena pada masa inilah surat kabar tidak lagi sekadar menjadi media informasi, tetapi juga berkembang menjadi ruang pertarungan gagasan, penyebaran ideologi, dan penyampaian kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah kolonial.[15]

Perkembangan pers Tionghoa yang semakin pesat pada dekade 1920-an tidak dapat dilepaskan dari perubahan situasi politik yang terjadi baik di Tiongkok maupun di Hindia Belanda. Revolusi Tiongkok tahun 1911 yang berhasil mengakhiri Dinasti Qing dan melahirkan Republik Tiongkok di bawah kepemimpinan Sun Yat Sen membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan

[15] Ahmad Kosasih, "Pers Tionghoa dan Dinamika Pergerakan Nasional di Indonesia 1900–1942," *Jurnal SUSURGALUH: Jurnal Kajian Sejarah dan Pendidikan Sejarah* (2013), 43 dan 51. Lihat juga Jayusman & Fachrurozi, "Eksistensi Kaum Tionghoa dalam Dunia Pers,".

masyarakat Tionghoa perantauan, termasuk di Hindia Belanda. Pada saat yang sama, di Hindia Belanda mulai berkembang organisasi-organisasi modern seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Partij, hingga Perhimpunan Indonesia yang menumbuhkan kesadaran kebangsaan di kalangan bumiputra. Di sisi lain, pemerintah kolonial berupaya mempertahankan loyalitas masyarakat Tionghoa melalui berbagai kebijakan, seperti pendirian *Hollandsch Chineesche School* (HCS) dan pemberian berbagai fasilitas pendidikan bagi kalangan Tionghoa. Perbedaan pengaruh politik tersebut menyebabkan masyarakat Tionghoa peranakan tidak lagi memiliki pandangan yang seragam mengenai identitas maupun masa depan politik mereka. Akibatnya, pers Tionghoa berkembang menjadi media yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi sarana penyebaran ideologi dan orientasi politik masing-masing kelompok.[16]

Dalam perkembangannya, pers Tionghoa peranakan kemudian terbagi ke dalam tiga orientasi politik utama. Kelompok pertama adalah pers yang berorientasi pada nasionalisme Tiongkok dengan *Sin Po* sebagai representasi utamanya. Kelompok ini beranggapan bahwa masyarakat Tionghoa peranakan tetap merupakan bagian dari bangsa Tiongkok sehingga harus mempertahankan identitas budaya, bahasa, serta ikatan emosional dengan tanah leluhur. Oleh karena itu, pemberitaan surat kabar dalam kelompok ini banyak memberikan perhatian

[16] Ahmad Kosasih, "Pers Tionghoa dan Dinamika Pergerakan Nasional di Indonesia 1900–1942," *Jurnal SUSURGALUH: Jurnal Kajian Sejarah dan Pendidikan Sejarah* (2013), 43 dan 51. lihat juga Wakhid, *Pers Tionghoa di Indonesia* (Yogyakarta: Galang Press, 1999), 53–61.

terhadap perkembangan politik di Tiongkok, mendukung gerakan nasionalisme Tiongkok, serta memperjuangkan hak-hak masyarakat Tionghoa di Hindia Belanda yang selama ini mengalami berbagai bentuk diskriminasi. Sikap tersebut bukan berarti menolak seluruh persoalan di Hindia Belanda, melainkan lebih menempatkan kepentingan masyarakat Tionghoa sebagai prioritas utama dalam setiap pemberitaan.[17]

Kelompok kedua adalah pers yang berorientasi pada nasionalisme Hindia Belanda, yang kemudian diwakili oleh *Sin Tit Po*. Berbeda dengan kelompok sebelumnya, surat kabar dalam orientasi ini memandang bahwa masyarakat Tionghoa peranakan telah menjadi bagian dari kehidupan sosial di Hindia Belanda sehingga memiliki tanggung jawab untuk ikut memperjuangkan masa depan Hindia Belanda. Tujuan utama orientasi ini ialah mendorong integrasi masyarakat Tionghoa dengan bangsa Indonesia melalui dukungan terhadap organisasi pergerakan nasional, memperkuat kerja sama dengan tokoh-tokoh bumiputra, serta menumbuhkan kesadaran bahwa perjuangan memperoleh kemerdekaan merupakan kepentingan bersama. Dalam perkembangannya, orientasi tersebut juga melahirkan hubungan yang erat dengan Partai Tionghoa Indonesia (PTI) sehingga *Sin Tit Po* sering dipandang sebagai salah satu media yang secara konsisten mendukung nasionalisme Indonesia.[18]

---

[17] Wakhid, *Pers Tionghoa di Indonesia* (Yogyakarta: Galang Press, 1999), 53–61. Lihat juga Ahmad Kosasih, "Pers Tionghoa dan Dinamika Pergerakan Nasional di Indonesia 1900–1942," *Jurnal SUSURGALUH: Jurnal Kajian Sejarah dan Pendidikan Sejarah* (2013), 43 dan 51.

[18] Abdurrachman Surjomihardjo, *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia* (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1980), 115–121.

Sementara itu, kelompok ketiga merupakan pers yang berafiliasi dengan organisasi Chung Hwa Hui dan diwakili oleh surat kabar *Siang Po*. Berbeda dengan dua kelompok sebelumnya, orientasi ini cenderung mempertahankan hubungan yang baik dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sikap tersebut didasarkan pada anggapan bahwa kerja sama dengan pemerintah kolonial dapat memberikan jaminan keamanan, kestabilan ekonomi, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat Tionghoa. Oleh karena itu, pemberitaan surat kabar dalam kelompok ini relatif lebih moderat dan tidak banyak menampilkan kritik terbuka terhadap pemerintah kolonial. Meskipun demikian, orientasi tersebut tidak berarti menolak identitas ke-Tionghoa-an, melainkan lebih menekankan strategi kompromi politik agar kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat Tionghoa tetap terpelihara di tengah situasi kolonial yang penuh pembatasan.[19]

Di antara ketiga orientasi tersebut, *Sin Po* menempati posisi yang paling menarik untuk dikaji. Sebagai surat kabar yang berorientasi pada nasionalisme Tiongkok, *Sin Po* memang berupaya membangun kesadaran kebangsaan masyarakat Tionghoa serta mengikuti perkembangan politik di negeri asalnya. Namun, orientasi tersebut tidak menjadikan *Sin Po* bersikap apatis terhadap dinamika politik di Hindia Belanda. Dalam berbagai pemberitaannya, *Sin Po* tetap memberikan ruang bagi isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat bumiputra, aktivitas organisasi pergerakan, serta berbagai kebijakan pemerintah

[19] Wakhid, *Pers Tionghoa di Indonesia* (Yogyakarta: Galang Press, 1999), 53–61. Lihat juga Jayusman & Fachrurozi, “Eksistensi Kaum Tionghoa dalam Dunia Pers,”.

kolonial yang dinilai merugikan masyarakat. Surat kabar ini juga menjalin hubungan yang cukup baik dengan sejumlah tokoh pergerakan nasional dan pernah melibatkan Wage Rudolf Supratman sebagai jurnalis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa orientasi nasionalisme Tiongkok yang dianut *Sin Po* tidak menghalanginya untuk menyuarakan kritik terhadap praktik kolonial serta memberikan perhatian terhadap perkembangan politik di Hindia Belanda. Posisi inilah yang membedakan *Sin Po* dari surat kabar Tionghoa lainnya sekaligus menjadikannya menarik sebagai objek penelitian.

Beberapa penelitian tentang media pers pada masa Kolonialisme Belanda, yang juga menggunakan beberapa koran sebagai sumber primernya, telah di pelajari oleh beberapa peneliti sebelumnya yang telah terbit secara publik. *Sinar Hindia* oleh Agus Sulton[20] digunakan sebagai sumber primer yang berfungsi untuk mengkaji gagasan perubahan sosial yang ditawarkan oleh Mas Marco Kartodikromo[21] melalui kritiknya terhadap kolonialisme lewat tulisan karya sastra dan artikel media berita pada awal abad ke-20.[22] Peneliti lainnya yakni Achmad Sujayadi, menggunakan surat kabar Belanda melalui sudut pandang koran *Java Bade* serta koran lainyya seperti *Algemeent Handelsblad, Bataviaasch Nieuwsblad, De Sumatra Post, Niuwe Rotterdamsche Courant,* dan *Het Vaderland.*[23] Sin Po sendiri juga demikian, banyak dikaji oleh beberapa peneliti seperti Faniesa Ardianti

[20] Agus Sulton, "Indonesian Sastra Liar: Political Strategies of Social Movements in Indonesia," *Jurnal Sastra Indonesia 10,* no. 2 (2021): 85–92.
[21] Agus Sulton, "Media Of Literary Works and Symbolic Social Movements of Mas Marco Kartodikromo," Philosophica: *Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya 5, no. 1 (July 11, 2022): 37, https://doi.org/10.35473/po.v5i1.1231.*
[22] Saka Tri Utama dan Muhammad Wildan Hasan, "Analisis Framing Surat Kabar Sinar Hindia, Sin Po dan Java Bode terhadap Protes Sosial Petani di Tangerang 1924," Socio Historica 2, no. 1 (2023), 108.
[23] *Ibid,* 108.

Mahdiyar yang mengkaji pers Tionghoa *Sin Po* dengan fokus pembahaan perkembangan pers dalam arus politik pergerakan nasional.[24]

Berdasarkan uraian tentang pers kolonial, pers Tionghoa, serta posisi surat kabar *Sin Po* dalam dinamika politik Hindia Belanda, dapat diketahui bahwasanya pers tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi sebagai ruang artikulasi kepentingan dan kritik terhadap kekuasaan kolonial. Pada kenyataanya pembahasan mengenai *Sin Po* selama ini masih cenderung bersifat deskriptif dan menempatkan surat kabar tersebut sebagai bagian dari sejarah pers Tionghoa atau pergerakan nasional. Secara tidak langsung menuntut untuk dikaji lebih lanjut. Tidak hanya melihat isi pemberitaan saja tapi juga menelaah bagaimana kritik kolonial dikonstruksi melalui bahasa, tema, dan sudut pandang pemberitaan. Pada titik inilah analisis wacana menjadi relevan untuk digunakan dalam penelitian ini. Perlu ditegaskan bahwa analisis wacana kritis di sini diposisikan sebagai metode bantu untuk membaca sumber sejarah secara lebih mendalam, bukan sebagai pengalihan fokus kajian ke ranah linguistik. Bahasa dan diksi yang digunakan redaksi *Sin Po* dibaca sebagai jejak historis dari strategi aktor pers dalam bernegosiasi dengan represi kolonial, sehingga tetap berada dalam kerangka sejarah sosial-politik pers, bukan kajian bahasa untuk kepentingan bahasa itu sendiri.

Pemilihan *Sin Po* sebagai objek kajian didasarkan pada tiga pertimbangan. Pertama, secara struktural, *Sin Po* menempati posisi liminal antara pers kolonial

[24] Faniesa Ardianti Mahdiyar, "*Sin Po: Peran pers Tionghoa dalam mendukung pergerakan nasional Indonesia 1925-1930*," Historiography 3, no. 1 (January 31, 2023): 154, https://doi.org/10.17977/um081v3i12023p154-161.

dan pers bumiputera, sehingga memiliki ruang gerak wacana yang khas dan tidak dapat disamakan dengan kedua arus pers lainya[25]. Kedua, secara redaksional, *Sin Po* menunjukkan sikap ganda yang jarang di temukan pada media Tionghoa lain, memegang teguh nasionalisme Tiongkok pasca-revolusi Xinhai, namun secara terstruksur turut menyediakan ruang pemberitaan bagi pergerakan[26]. Ketiga, secara metodologis arsip *Sin Po* tahun 1920 tersimpan relative lengkap dan dapat diakses secara resmi di Perpustakaan Nasional RI, sebuah kondisi yang tidak dimiliki banyak media Tionghoa sezaman lainya, sehingga memungkinkan analisis wacana kritis dilakukan secara sistematis dan terverifikasi.

Pemilihan fokus penelitian pada tahun 1920 bukan hanya pertimbangan teknis, melainkan didasarkan pada konvergensi dua faktor, kematangan institusional *Sin Po* sebagai media dan intensifikasi represi kolonial terhadap organisasi pergerakan sebagaimana tercermin dalam pemberitaan *Sin Po* No. 25 yang menyebutkan 'revolutionnair' dan communism dalam konteks tekanan pembubaran Sarekat Islam. Kovergensi inilah yang menjadikan tahun 1920 sebagai titik waktu yang padat secara diskursif, sehingga memungkinkan peneliti membaca repeartoar strategi wacana *Sin Po* secara utuh dalam rentang yang terjangkau untuk dianalisis mendalam. Perluasan periode ke rentang waktu 1920 -1930 atau 1920 -1940 secara sadar ditempatkan sebagai agenda penelitian lanjutan, bukan diabaikan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

---

[25] Ahmad Kosasih, "Pers Tionghoa dan Dinamika Pergerakan Nasional di Indonesia 1900–1942," *Jurnal SUSURGALUH: Jurnal Kajian Sejarah dan Pendidikan Sejarah* (2013), 56.

[26]Sin Po, No. 25, Tahun 11, 30 Oktober 1920; lihat juga Ahmad Kosasih, "Pers Tionghoa dan Dinamika Pergerakan Nasional di Indonesia 1900–1942," 57.

bagaimana wacana kritik kolonial dikonstruksi dalam pemberitaan surat kabar *Sin Po* tahun 1920. Penelitian ini menempatkan *Sin Po* sebagai aktor historis yang berperan dalam dinamika politik kolonial melalui praktik wacana pers. Dengan pendekatan kualitatif dan analisis wacana, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian sejarah pers, sejarah kolonial, serta pemahaman mengenai bentuk-bentuk kritik non frontal terhadap kolonialisme di Hindia Belanda.

Kajian mengenai surat kabar *Sin Po* tidak hanya penting untuk memahami sejarah pers Tionghoa di Hindia Belanda, tetapi juga untuk menelaah bagaimana kritik terhadap kolonialisme dikonstruksi melalui praktik wacana media. Penelitian ini tidak hanya melihat isi pemberitaan secara deskriptif, tetapi juga menganalisis bagaimana bahasa, tema, dan sudut pandang pemberitaan digunakan untuk membentuk kritik terhadap kekuasaan kolonial. Maka dari itu pendekatan analisis wacana kritis digunakan untuk membaca pemberitaan *Sin Po* sebagai praktik diskursif yang terlibat dalam dinamika politik kolonial Hindia Belanda tahun 1920.

A. Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana perkembangan Surat Kabar *Sin Po* 1910-1920?
2. Bagaimana konstruksi kritik kolonial dalam pemberitaan surat kabar *Sin Po* tahun 1920 ?
3. Bagaimana strategi wacana yang digunakan oleh *Sin Po* dalam menyampaikan kritik terhadap kolonialisme Belanda tahun 1920?

B. Tujuan Penelitian

1. Merekonstruksi perkembangan Surat Kabar *Sin Po* tahun 1910-1920.
2. Menganalisis konstruksi kritik kolonial dalam pemberitaan surat kabar *Sin Po* tahun 1920.
3. Mengidentifikasi dan menjelaskan strategi wacana yang digunakan oleh *Sin Po* dalam menyampaikan kritik terhadap kolonialisme Belanda tahun 1920.

C. Batasan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua lingkup temporal yang saling berkaitan. Periode 1910–1920 digunakan untuk merekonstruksi latar historis-institusional *Sin Po* sebagai landasan konteks, yang menjawab rumusan masalah pertama. Tahun 1920 digunakan sebagai unit analisis utama untuk mengkaji konstruksi wacana dan strategi kritik kolonial, yang menjawab rumusan masalah kedua dan ketiga. Tahun 1920 merupakan titik kulminasi dari proses institusional yang berlangsung sejak 1910, sehingga kedua lingkup waktu ini bersifat berkelanjutan dan tidak terpisah satu sama lain.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menganalisis terkait surat kabar *Sin Po* dalam memberitakan wacana kritik kolonial pada tahun 1920. Penelitian ini menggunakan kaidah metode sejarah yang melalui beberapa proses guna mempermudah saat penguraian historiografi. Metode penelitian sejarah skripsi ini merujuk metodologi sejarah Kuntowijoyo yang terdiri dari pengumpulan sumber, verifikasi atau kritik sumber,

interpretasi atau penafsiran, dan historiografi atau penulisan sejarah.[27]

Tahap pertama adalah heuristik, yaitu proses penelusuran dan pengumpulan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, sumber utama yang digunakan adalah surat kabar *Sin Po* tahun 1920 yang memuat berbagai pemberitaan terkait kebijakan kolonial. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer yakni berupa arsip surat kabar Sin Po tahu 1920 .[28]

Sumber-sumber tersebut didapatkan melalui situs web resmi Perpustakaan Nasional RI melalui UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno saat penulis melaksanakan PPL di tempat tersebut. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan sumber pendukung seperti buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang membahas pers Tionghoa, kolonialisme, serta analisis wacana kritis. Proses heuristik dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi, ketersediaan, dan keterkaitan sumber terhadap fokus penelitian. Melalui tahap ini, peneliti memperoleh data yang cukup untuk dianalisis lebih lanjut dalam kerangka historis dan diskursif.[29]

Tahap kedua adalah kritik sumber, yang bertujuan untuk menguji keabsahan dan kredibilitas sumber yang telah dikumpulkan. Kritik sumber terbagi menjadi dua, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal dilakukan untuk

---

[27] Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), 89–91.
[28] *Ibid,* 89–91.
[29] *Ibid,* 91.

memastikan keaslian sumber, seperti tahun terbit, bentuk fisik, serta otoritas penerbit surat kabar *Sin Po*. Sementara itu, kritik internal dilakukan untuk menilai isi sumber, termasuk akurasi informasi, kecenderungan redaksi, serta kemungkinan adanya bias dalam pemberitaan. Tahap ini menjadi penting karena surat kabar sebagai produk media tidak bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan tertentu dan konteks sosial-politik pada masanya.[30]

Tahap ketiga adalah interpretasi, yaitu proses penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah yang telah diverifikasi. Dalam penelitian ini, interpretasi dilakukan dengan menggabungkan metode sejarah dan pendekatan analisis wacana kritis model Norman Fairclough. Peneliti tidak hanya membaca teks sebagai sumber informasi, tetapi juga sebagai praktik diskursif yang mengandung makna ideologis. Melalui tahap ini, pemberitaan *Sin Po* dianalisis untuk mengungkap bagaimana kritik terhadap kebijakan kolonial dikonstruksi melalui bahasa, pilihan diksi, serta strategi narasi. Dengan demikian, interpretasi menjadi jembatan antara fakta historis dan makna yang terkandung dalam teks.[31]

Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu proses penulisan hasil penelitian sejarah secara sistematis dan kronologis. Pada tahap ini, peneliti menyusun temuan penelitian dalam bentuk narasi ilmiah yang utuh, dengan mengintegrasikan hasil analisis sumber dan interpretasi yang telah dilakukan. Penulisan tidak hanya bertujuan untuk merekonstruksi peristiwa, tetapi juga untuk menjelaskan dinamika

---

[30] Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), 94.
[31] Norman Fairclough, *Language and Power* (London: Longman, 1989), 24.

wacana kritik kolonial dalam surat kabar *Sin Po*. Dengan demikian, historiografi dalam penelitian ini tidak sekadar bersifat deskriptif, tetapi juga analitis, karena berupaya mengungkap hubungan antara teks, konteks sosial, dan relasi kekuasaan dalam sistem kolonial Hindia Belanda.[32]

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teeoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi memperkaya kajian historiografi pers di Indonesia dengan mengoperasionalkan pendekatan Analisis Wacana Kritis Fairclough pada sumber sejarah kolonial. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi lembaga arsip dan Perpustakaan Nasional sebagai dorongan untuk mempercepat digitalisasi dan preservasi koleksi pers kolonial khususnya pers Tionghoa. Bagi institusi Pendidikan dapat digunakan sebagai rujukan pengembangan riset interdisipline yang memadukan sejarah dan analisis wacana. Bagi masyarakat dan komunitas-konumitas Tionghoa-Indonesia sebagai bagian dari memori kolektif dan pengakuan atas peran historis mereka dalam dinamika politik kolonial. Bagi praktisi jurnalis media, sebagai refleski bahwa jurnalisme kritis tetap dapat dijalankan bahkan dalam kondisi keterbatasan kebebasan pers.

[32] Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, 102.